

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penagihan Pajak

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Menurut Suandy (2006:45) penagihan pajak terdiri atas tiga bentuk, yaitu :

a. Penagihan pasif

Penagihan pasif adalah penagihan pajak yg dilakukan dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), SK Pembetulan, SK Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan pajak terutang lebih besar. Dalam penagihan pasif, fiskus hanya memberitahukan ke Wajib Pajak mengenai adanya utang pajak. Apabila dalam jangka waktu satu bulan sejak diterbitkan Surat Tagihan Pajak atau surat lain yang sejenis wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya maka fiskus akan melakukan penagihan aktif.

b. Penagihan aktif

Penagihan aktif adalah kelanjutan dari penagihan pasif. Dalam penagihan aktif, fiskus berperan aktif sampai dengan tindakan sita dan lelang. Adapun tahap penagihan aktif adalah sebagai berikut: Surat Teguran. Penagihan Pajak Seketika Sekaligus. Surat Paksa. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Pelaksanaan Lelang.

c. Penagihan pajak seketika dan sekaligus

Penagihan pajak seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai keperluan negara salah satunya adalah membiayai pembangunan nasional. Pajak merupakan iuran yang wajib dibayarkan oleh Wajib Pajak. Namun, tidak semua Wajib Pajak patuh dalam membayar pajak sehingga pemerintah perlu mengatasi masalah tersebut. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah adalah melaksanakan penagihan pajak baik secara aktif maupun pasif.

2.2 Proses Penagihan Pajak

Dari uraian tentang penagihan pajak diatas dapat disimpulkan bahwa KPP Madya Sidoarjo yang dimana Seksi Penagihan sebagai pelaksana kegiatan menagih pajak kepada penanggung pajak WP Badan di wilayah kerja KPP Madya Sidoarjo melakukan langkah-langkah berikut dalam upaya penagihan pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penagihan Pajak antara lain :

1. Dasar penagihan pajak adalah STP, SKPKB, dll.
2. Jatuh tempo STP, SKPKB, dll. berbeda antara ketetapan dengan Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya dengan Tahun Pajak 2008 dan seterusnya, maka untuk menentukan tanggal terbit Surat Teguran antara Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya dengan 2008 dan seterusnya sudah sama, yakni setelah lewat 7 hari sejak saat jatuh tempo
3. Bila utang pajak yang tercantum dalam Surat Teguran tetap saja belum dilunasi oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, maka setelah lewat 21 hari sejak tanggal Surat Teguran, maka Surat Paksa diterbitkan atas Wajib Pajak yang bersangkutan
4. Dalam waktu 2 X 24 jam setelah Surat Paksa yang telah diberitahukan belum juga direspon oleh Wajib Pajak, maka Juru Sita Pajak dapat melakukan tindakan penyitaan

5. Namun adakalanya Juru Sita Pajak tidak menemukan Objek sita yang akan disita, maka tindakan pemblokiran nomor rekening, pencegahan, penyanderaan, dan pengumuman di Media Massa dapat dilakukan. Walaupun tindakan penyitaan telah dilakukan bahkan mungkin telah dilakukan lelang atas barang yang disita, akan tetapi tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak, maka tindakan pencegahan, dan lain-lain masih tetap dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak
6. Lelang Dalam jangka waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum juga dilunasi akan dilanjutkan dengan pengumuman lelang melalui media massa. Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali. Penjualan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara terhadap barang yang disita, dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang. Dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan. Catatan Barang dengan nilai paling banyak Rp.20.000.000,- tidak harus diumumkan melalui media massa.
7. Penyitaan dapat dilakukan oleh Juru Sita Pajak apabila utang pajak yang tercantum dalam Surat Paksa tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak
8. Apabila setelah dilakukan penyitaan Penanggung Pajak masih tetap tidak melunasi utang pajaknya maka pejabat akan membuat Pengumuman Lelang
9. Pelaksanaan Lelang tetap masih dapat dilakukan apabila Penanggung Pajak masih tetap tidak melunasi utang pajaknya

10. Untuk barang bergerak, pengumuman lelang dilakukan satu kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan dua kali
11. Pencabutan sita dapat dilakukan Juru Sita Pajak apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dilunasi oleh Penanggung Pajak
12. Pencabutan sita juga dapat dilakukan oleh Juru Sita apabila ada putusan dari pengadilan

2.3 Tunggakan Pajak

Tunggakan Pajak adalah jumlah pokok pajak yang belum dilunasi berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang didalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Tunggakan pajak ini disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu:

1. Karena pemeriksaan

Pemeriksaan ini meliputi:

- a. Surat Ketetapan Pajak (SKP). Surat Ketetapan Pajak (SKP) ini diterbitkan terbatas pada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidak benaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) atau karena ditemukannya data fisik yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.
 - b. Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan penagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda bagi Wajib Pajak.
2. Karena Wajib Pajak tidak mampu membayar kewajiban dalam hal ini tuggakan timbul karena murni yang bersangkutan atau Wajib Pajak tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila bidang penagihan mendapati adanya tunggakan yang disebabkan seperti diatas, maka akan dilakukan tindakan penagihan aktif sebagai sarana untuk menagih pajak kepada Wajib Pajak.